

**PERAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA
PANANJUNG KECAMATAN PANGANDARAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

RESTI DESTA HERYANI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi masih kurangnya Pemimpin informal belum menunjukkan keaktifan dalam menggerakkan masyarakat, memberikan sosialisasi, motivasi dan memfasilitasi masyarakat serta kurang melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan . Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah peran pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ? 2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal, Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan sebanyak 37,22% menyatakan baik sedangkan sebanyak 62,78% menyatakan kurang baik. Hambatan-hambatan yang terjadi seperti kurang terasannya manfaat dari pembangunan karena belum adanya kejelasan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi seperti mendengarkan segala aspirasi dari masyarakat agar dapat mengetahui secara langsung kebutuhan dan keinginan masyarakat, berusaha untuk lebih baik dan bijak dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat, di sela-sela kesibukan sehari-harinya para tokoh masyarakat berusaha untuk meluangkan waktu untuk turun langsung mengikuti program pembangunan agar masyarakat merasa tergerak untuk mengikutinya, Para tokoh masyarakat berusaha untuk meluangkan waktu yang tepat misalkan setiap sore di saat santai untuk memberikan informasi mengenai program pembangunan serta para tokoh masyarakat bersama-sama dengan masyarakat berusaha untuk memantapkan perencanaan program pembangunan.

Kata Kunci : *Peran, Pemimpin Informal, Pemberdayaan Masyarakat*

A. PENDAHULUAN

Persebaran penduduk yang tidak merata di atas ruang wilayah kota dan desa juga sering menjadi kendala pemerataan pembangunan. Konsentrasi pembangunan yang lebih terfokus di wilayah kota juga memberikan pengaruh terhadap konsep ketimpangan pembangunan. Padahal menurut Adisasmita, (2006:78) menyatakan "Kuantitas dalam konteks jumlah penduduk menyebutkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan ideal adalah daerah pedesaan".

Desa adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dadihormati oleh negara. Pembangunan wilayah pedesaan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat serta upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif.

Daerah pedesaan sangat luas wilayahnya, sebagian besar penduduknya hidup di sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan), artinya struktur perekonomiannya

sangat berat sebelah pada sektor pertanian atau merupakan daerah yang berbasis agraris (*agriculture base*).

Di desa selalu ada dua tokoh kepemimpinan, yakni tokoh informal dan tokoh formal. Tokoh informal merupakan tokoh yang mempunyai kekuatan ikatan batin dengan masyarakatnya sehingga mempunyai pengaruh yang besar. Tokoh informal yang dominan misalnya tokoh agama dan tokoh adat. Tokoh formal merupakan pemerintahan desa yang mempunyai kekuatan hukum. Kedua tokoh tersebut tidak dapat dilepaskan peranannya untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan desa.

Tokoh-tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat) mempunyai kedudukan dan pengaruh besar di tengah-tengah masyarakatnya, karena mereka memiliki keunggulan, baik dalam ilmu pengetahuan, jabatan, keturunan dan lain sebagainya. Tokoh masyarakat informal adalah pemimpin informal dalam masyarakatnya yang diangkat dan ditunjuk atas kehendak dan persetujuan dari masyarakatnya. Tokoh masyarakat informal yang dimaksud adalah tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai integritas tinggi, memegang teguh pendapat dan keyakinannya, tetapi terbuka untuk bisa menerima perbedaan secara bijaksana. Selain diharapkan memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya, secara kultural mereka juga diharapkan memiliki kekuatan nyata yang bisa menggerakkan orang untuk sebuah

tujuan mulia, yakni: membangun saling pengertian, kebersamaan, kerjasama dan solidaritas intern serta ekstern.

Pembangunan yang dilakukan baik di tingkat pedesaan pada dasarnya harus melibatkan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Apalagi dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa. Pada pelaksanaan pembangunan tersebut, maka peran tokoh informal memegang peranan yang sangat penting.

Untuk dapat mensukseskan program pembangunan selain dibutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat juga dibutuhkan pemimpin yang bersedia tampil dalam setiap pembangunan. Seorang pemimpin harus memiliki sikap pelopor, berani, memberikan contoh dan teladan yang baik serta rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat. Keberhasilan pembangunan pedesaan ditentukan oleh beberapa hal diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dan kemampuan serta keterampilan pemimpin-pemimpinnya di dalam menggerakkan semangat pembangunan. Pemimpin informal memberikan pengaruh terhadap program pembangunan, sehingga untuk dapat melaksanakan program pembangunan diperlukan kerjasama antara tokoh pemimpin formal maupun informal", dalam masyarakat.

Dengan demikian pemimpin informal berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan desa sehingga melalui kepemimpinannya

dapat mempengaruhi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam program pembangunan yang direncanakan.

Saat ini hampir seluruh kegiatan pembangunan, pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan metode pembangunan partisipatif, namun masing-masing kegiatan pembangunan terdapat perbedaan pada target sasaran masyarakat yang direncanakan untuk berperan serta dalam kegiatan perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Perbedaan tersebut terjadi pada tingkatan kedudukan fungsi dan peran para pelaku di masyarakat.

Uraian tersebut sejalan dengan hasil peninjauan awal yaitu berdasarkan hasil observasi diketahui atau diperoleh informasi bahwa pemimpin informal belum optimal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini bisa dilihat dari indikator sebagai berikut : 1) Pemimpin informal belum menunjukkan keaktifan dalam memberikan sosialisasi, motivasi dan memfasilitasi masyarakat serta kurang melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 2) Pemimpin informal belum berperan sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan. 3) Pemimpin informal belum berperan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Bertolak dari permasalahan tersebut tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah peran pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ? 2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?

B. LANDASAN TEORITIS

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan lancar apabila masyarakat berperan aktif dalam menunjang penyelenggaraan roda pemerintahan, selain masyarakat aktif tokoh masyarakat juga sangat berperan dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Keikutsertaan tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas pelaksanaannya baik dalam Pembangunan Desa, pengambilan keputusan atau pembuatan Peraturan Desa.

Peranan berasal dari kata peran. Menurut Harahap (2007:85) peranan adalah :

Serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Sedangkan didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Sedangkan menurut Santosa (2003:62) makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu :

Pertama penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, peran berarti karakter yang dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah penampilan dengan peran tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan hubungan dengan manusia lain, hubungan ini dikenal dengan istilah interaksi. Sebagai makhluk sosial manusia hidup berkelompok baik berupa kelompok kecil maupun dalam kelompok besar.

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan kebutuhan manusia secara kodrat, karena kelebihan dan kekurangan atau keterbatasan yang melekat pada dirimanusia, disatu sisi

memerlukan pemimpin dan disisi lain pada saat tertentu dituntut untuk mampu memimpin. Masalah kepemimpinan muncul bersamaan dengan peradaban manusia. Dan ada anggapan bahwa maju atau mundurnya suatu organisasi, maka sangat bergantung kepada bagaimana pemimpinnya berperilaku.

Kepemimpinan menurut Syafi'ie (2000:1) sebagai berikut:

Suatu kemampuan dan keperibadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

Kepemimpinan merupakan kemampuan dan keperibadian dari seorang untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemimpin tersebut, selain itu kepemimpinan pula menjadi suatu awal struktur dan pusat dari sebuah kelompok (masyarakat), dan akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, dan faktor yang lainnya adalah dukungan serta dorongan dari luar atau eksternal.

Sedangkan menurut Nawawi (2003: 23) bahwa:

Kepemimpinan adalah hubungan dimana seseorang yakni pemimpin mempengaruhi pihak lain untuk bekerjasama secara suka rela dalam mengusahakan (mengerjakan)

tugas-tugas yang berhubungan, untuk mencapai hal-hal yang diinginkan pemimpin tersebut.

Kepemimpinan juga bermakna kecakapan, kemampuan dan keperibadian seseorang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, dengan demikian kepemimpinan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Mandiri berarti masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya (baik secara individu ataupun kolektif) melalui usaha yang dilakukan dan tidak bergantung pada yang lain. Jaringan kerja merupakan kerangka kerjasama yang dilakukan oleh stakeholder yaitu pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat sehingga pembangunan tidak merugikan pihak manapun dan dapat memberikan hasil yang merata yang merupakan konsep keadilan (kesejahteraan yang merata). Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan semua pihak yang berkaitan termasuk masyarakat itu sendiri. Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut merencanakan, melaksanakan, dan menilai

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah hal kekuasaan. Pemberdayaan secara substantif merupakan proses memutus atau break down dari hubungan antara subyek dan

obyek. Proses ini mementingkan pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini pentingnya mengalirnyadaya dai subjek ke objek. Hasil ahir dari proses pemberdayaan adalah : Beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru) sehingga realisasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan realisasi antar subjek dengan subjek yang lain.

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 12 Tentang Desa menyatakan :

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Dan pemberdayaan bisa diartikan memberi kemampuan kepada orang yang lemah. Bukan hanya dalam arti tidak terbatas kemampuan ekonomi, tapi juga kemampuan lainnya yang bisa membuat orang lain berdaya seperti dalam politik, budaya, sosial, agama dan lainnya. Harus dicatat, kemampuan

ini bukan hanya berarti mampu memiliki uang, modal, tapi kekuatan atau mobilitas yang tinggi pun itu kemampuan pemberdayaan diri sendiri.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 1 angka 1 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna menyatakan :

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Pemberdayaan ini mengarahkan manusia agar sadar dengan kemampuan yang dimilikinya dan memanfaatkan kekuatan yang telah ada menjadi berdaya dan dapat dimanfaatkan untuk aktifitas yang berarti. Pemberdayaan pada jenis ini berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan manusia itu sendiri, dimana kebutuhan hidup harus dipenuhi oleh yang bersangkutan secara mandiri

Pengertian pemberdayaan menurut Hikmat (2010:3) mengartikan :

Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang orang yang secara

konsekuensi melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal.

Pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab, manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang mempunyai kualitas.

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Dibentuknya lembaga di setiap desa sebagai wujud partisipasi masyarakat desa akan mempercepat proses pembangunan fisik di desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat (2) Pembangunan Nasional adalah : "Upaya yang dilaksanakan oleh semua

komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara".

Adapun menurut Soleh (2014:45) pembangunan adalah : "Usaha terencana untuk mengarahkan rakyat di negara yang bersangkutan dalam penggunaan sumberdaya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan rakyat di negara yang bersangkutan".

Dengan demikian dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Dengan demikian maka penulis mengambil informan sebanyak 6 orang pemimpin informal dan 9 orang perwakilan masyarakat sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang Teknik pengumpulan data melalui study pustaka (*literature study*) dan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara (*interview*).

Adapun langkah-langkah pengolahan data kualitatif menurut

Sugiyono (2008:247) adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data
2. Penyajian Data
3. Menarik kesimpulan/verifikasi

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemimpin Informal dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

1. Sebagai motivator

a. Memberi bimbingan penyuluhan kepada masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian masih adanya sebagian tokoh masyarakat yang kurang memperhatikan program pemberdayaan masyarakat untuk kepentingan pembangunan Desa, hal ini dikarenakan belum adanya amanat dari Pemerinatah Desa untuk memberdayakan masyarakatnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi mengenai pemimpin informal memberi bimbingan penyuluhan kepada masyarakat, diketahui selama ini sebagian masyarakat masih menganggap pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan hanya berupa ajakan saja belum sampai kepada hal yang intinya sehingga belum mengetahui program pembangunan yang akan dilaksanakan.

b. Memberikan petunjuk-petunjuk bagi perorangan, keluarga maupun masyarakat untuk mengikuti program pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian belum jelasnya program pembangunan yang akan dilaksanakan menyebabkan sebagian tokoh masyarakat terlihat masih belum mampu untuk menyampaikan dan memberikan petunjuk kepada masyarakat untuk mengikuti program pembangunan Desa yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi mengenai memberikan petunjuk-petunjuk bagi perorangan, keluarga maupun masyarakat untuk mengikuti program pembangunan, diketahui selama ini belum adanya tindak lanjut yang nyata dari tokoh masyarakat setelah memberikan petunjuk untuk mengikuti program pembangunan Desa hal ini dikarenakan belum jelasnya program pembangunan yang akan dilaksanakan.

c. Memotivasi masyarakat dan lingkungannya untuk terlibat langsung dan secara aktif dalam program pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian tidak semua program pembangunan Desa disetujui oleh sebagian tokoh masyarakat sehingga tokoh masyarakat kurang memberikan motivasi kepada masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil observasi mengenai memotivasi masyarakat dan lingkungannya untuk terlibat langsung dan secara aktif dalam program pembangunan, diketahui selama ini karena masih kurangnya program pembangunan yang akan dilaksanakan menyebabkan masyarakat kurang termotivasi untuk terlibat secara langsung dalam program pembangunan tersebut.

2. Sebagai dinamisator

- a. Menggerakkan orang-orang, baik individu, keluarga, maupun masyarakat untuk mengikuti program pembangunan**

Berdasarkan hasil penelitian masih kurangnya sebagian tokoh masyarakat memberikan contoh dengan turun langsung mengikuti dalam program pembangunan sehingga untuk menggerakkan masyarakat untuk mengikuti program pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil observasi mengenai menggerakkan orang-orang, baik individu, keluarga, maupun masyarakat untuk mengikuti program pembangunan, diketahui selama ini masih kurangnya peran aktif sebagian tokoh masyarakat sehingga sulit menggerakkan masyarakat untuk mengikuti program pembangunan Desa.

- b. Mengajak masyarakat untuk mengikuti program pembangunan**

Berdasarkan hasil penelitian dengan kesibukannya masing-masing sehingga terkadang masih kurang dilakukan komunikasi oleh sebagian tokoh masyarakat sehingga sulit untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti program pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil observasi mengenai mengajak masyarakat untuk mengikuti program pembangunan, diketahui selama ini masih kurangnya interaksi dengan masyarakat yang dilakukan oleh sebagian tokoh masyarakat sehingga sulit untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti program pembangunan Desa.

- c. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program pembangunan.**

Berdasarkan hasil penelitian masih terlihat kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi mengenai melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program pembangunan, diketahui selama ini belum terlihat adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang dianggap penting dalam pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan di Desa.

3. Sebagai fasilitator

- a. Memberikan gagasan baru untuk meningkatkan pemahaman masyarakat**

tentang program pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian masih kurang dilakukan sosialisasi oleh tokoh masyarakat mengenai program pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat kurang memahaminya.

Berdasarkan hasil observasi mengenai memberikan gagasan baru untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program pembangunan, diketahui selama ini para tokoh masyarakat masih kesulitan untuk berkumpul bersama dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai program pembangunan yang akan dilaksanakan.

b. Cepat tanggap dalam menghadapi masalah yang ada di masyarakat sehubungan dengan program pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian karena dengan kesibukan kesehariannya sehingga pada saat ada permasalahan sebagian tokoh masyarakat belum mampu untuk menghadapinya dengan secara cepat.

Berdasarkan hasil observasi mengenai cepat tanggap dalam menghadapi masalah yang ada di masyarakat sehubungan dengan program pembangunan, diketahui selama ini sebagian masyarakat menganggap masih kurang cepatnya peran dari sebagian tokoh masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yang

kurang setuju terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan.

c. Mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian masih terlihat kurangnya interaksi dengan semua elemen masyarakat sehingga belum mengetahui permasalahan yang terjadi menyebabkan belum adanya kepercayaan secara penuh terhadap para tokoh masyarakat

Berdasarkan hasil observasi mengenai mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, diketahui selama ini sebagian tokoh masyarakat belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat karena belum mengetahui secara jelas permasalahan yang terjadi sebenarnya.

4. Sebagai mediator

a. Membantu mengatasi masalah yang ada di masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan program pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian ternyata peran tokoh masyarakat belum terlalu kelihatan untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil observasi mengenai membantu mengatasi masalah yang ada di masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan program pembangunan, diketahui

selama ini masih kurangnya dilakukan koordinasi antara tokoh masyarakat dengan Pemerintah Desa sehingga belum mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat mengenai program pembangunan yang akan dilaksanakan.

b. Memberikan saran-saran yang diperlukan oleh masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan program pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian masih kurangnya dilakukan pertemuan dengan semua elemen masyarakat sehingga tokoh masyarakat belum mampu untuk memberikan saran mengenai program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil observasi mengenai memberikan saran-saran yang diperlukan oleh masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan program pembangunan, diketahui selama ini sebagian masyarakat belum mendengar adanya undangan untuk melaksanakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat mengenai program pembangunan yang akan dilaksanakan.

c. Program pembangunan dapat memenuhi harapan dari masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian kurangnya dilakukan sosialisasi mengenai program pembangunan yang akan dilaksanakan menyebabkan masih kurang terakomodirnya aspirasi dari semua lapisan masyarakat sehingga

pembangunan yang dilaksanakan belum mampu memenuhi harapan dari semua elemen masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi mengenai program pembangunan dapat memenuhi harapan dari masyarakat, diketahui selama ini masih belum terlihatnya peran dari para tokoh masyarakat dalam program pembangunan agar pembangunan yang dilaksanakan mampu memenuhi harapan semua elemen masyarakat.

2. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Pemimpin Informal dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran seperti :

1. kurang terasanya manfaat dari pembangunan karena belum adanya kejelasan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
2. Masih kurangnya sebagian tokoh masyarakat memberikan contoh dengan turun langsung mengikuti program pembangunan.

3. Masih kurangnya waktu untuk berkumpul bersama dengan masyarakat karena terbentur dengan kesibukan masing-masing.
 4. Tidak semuanya program pembangunan yang akan dilaksanakan di setujui oleh masyarakat sehingga menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat.
- 3. Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-hambatan yang Dihadapi Pemimpin Informal, dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.**

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran seperti sulit untuk bertemu dengan sebagian masyarakat karena kesibukan dari rutinitas kesehariannya, masih adanya sebagian tokoh masyarakat yang kurang aktif dalam memberikan motivasi untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan, masih kurangnya dilakukan komunikasi antara tokoh masyarakat dengan semua elemen masyarakat sehingga sulit untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti program pembangunan Desa, karena dengan kesibukan kesehariannya sehingga pada saat ada permasalahan sebagian tokoh masyarakat belum mampu untuk menghadapinya dengan secara cepat serta tidak semuanya program pembangunan yang akan dilaksanakan di setujui oleh masyarakat sehingga

menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran seperti

1. Mendengarkan segala aspirasi dari masyarakat agar dapat mengetahui secara langsung kebutuhan dan keinginan masyarakat.
2. Berusaha untuk lebih baik dan bijak dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat,
3. Di sela-sela kesibukan sehari-harinya para tokoh masyarakat berusaha untuk meluangkan waktu untuk turun langsung mengikuti program pembangunan agar masyarakat merasa tergerak untuk mengikutinya.
4. Para tokoh masyarakat bersama-sama dengan masyarakat berusaha untuk

mematangkan perencanaan program pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran seperti para tokoh masyarakat sudah mengajak aparatur Desa untuk mengundang masyarakat di waktu yang telah disepakati bersama, tokoh masyarakat berusaha untuk lebih memasyarakat dan berkomunikasi secara familier dan kekeluargaan untuk mengajak masyarakat turut serta mengikuti program pembangunan, berusaha untuk membicarakan dan menyepakati waktu untuk berkumpul bersama agar dapat mengatasi permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, serta sudah membuat jadwal yang sudah disepakati bersama untuk melakukan pertemuan dengan semua elemen masyarakat dalam memberikan saran mengenai program pembangunan yang akan dilaksanakan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara mengenai peran pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan yang menyatakan tidak baik. Begitupun berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa peran pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik seperti pada pelaksanaan pembangunan ditekankan pada usaha yang menggunakan keterampilan tertentu dan pendekatan manusiawi dan memotivasi masyarakat dengan penuh rasa tanggungjawab sehingga kemampuan pemimpin informal dalam berusaha untuk mencari alternatif-alternatif terbaik sebagai pilihan untuk memecahkan masalah sangatlah penting sehingga pembangunan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Berdasarkan hasil wawancara mengenai hambatan-hambatan yang dirasakan diketahui selama ini :
 - a. Belum terasa manfaat dari pelaksanaan program pembangunan yang telah dilaksanakan.
 - b. Belum adanya kejelasan program pembangunan yang akan dilaksanakan.

- c. Kurangnya sebagian tokoh masyarakat memberikan contoh dengan turun langsung mengikuti program pembangunan.
- d. Kurangnya waktu untuk berkumpul bersama dengan masyarakat.
- e. Tidak semuanya program pembangunan yang akan dilaksanakan di setuju oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui hambatan-hambatan yang dirasakan seperti masih adanya sebagian tokoh masyarakat yang kurang aktif dalam memberikan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan, kurangnya dilakukan komunikasi dengan semua elemen masyarakat, karena dengan kesibukan kesehariannya sehingga pada saat ada permasalahan belum mampu untuk menghadapinya dengan secara cepat serta tidak semuanya program pembangunan yang akan dilaksanakan di setuju oleh masyarakat.

3. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya-upaya yang dilakukan seperti
 - a. Mendengarkan segala aspirasi masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - b. Lebih baik dan bijak dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat.
 - c. Berusaha untuk meluangkan waktu untuk turun langsung

mengikuti program pembangunan.

- d. Berusaha untuk meluangkan waktu yang tepat untuk memberikan informasi mengenai program pembangunan.
- e. Berusaha untuk memantapkan perencanaan program pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi seperti mengajak aparatur Desa untuk mengundang masyarakat di waktu yang telah disepakati bersama, berusaha untuk lebih memasyarakat dan berkomunikasi secara familier dan kekeluargaan untuk mengajak masyarakat turut serta mengikuti program pembangunan, berkumpul sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama untuk memberikan saran mengenai program pembangunan yang akan dilaksanakan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sebagai motivator sebaiknya pemimpin informal meningkatkan komunikasi dengan masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan ataupun evaluasi pembangunan.
2. Sebagai dinamisator sebaiknya pemimpin informal lebih menciptakan kondisi yang

harmonis di masyarakat melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat.

3. Sebagai fasilitator sebaiknya pemimpin informal lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan serta lebih peka terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat.
4. Sebagai mediator sebaiknya pemimpin informal mengajak peran serta semua pihak dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga timbul keinginan dari masyarakat untuk turut serta dalam merealisasikan pembangunan.

F. DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Buku :

- Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Harahap, dkk. 2007. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- Hikmat Hary. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humani ora Utama Press
- Nawawi, Hadari. 2003. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Santosa, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialekta Pembangunan dengan Pemberdayaan*, Bandung: Fokus media
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2000. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama

b. Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna